BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Tempat Kerja Praktek

2.1.1 Sejarah SAMSAT

Embrio lahirnya SAMSAT diawali oleh sebuah gagasan brilyan yang disampaikan pada forum penataran para pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Se-Indonesia pada bulan April 1976 di Jakarta. Sehingga hasil penataran menghasilkan suatu rekomendasi berupa usulan kepada pemerintah, khususnya pimpinan Departemen Dalam Negeri agar SAMSAT dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia.

Landasan Hukum dari pembentukan SAMSAT ini berdasarkan pada surat keputusan bersama Menhankam/Pangab, Mentri Keuangan dan Mentri Dalam Negeri Nomor Pol.Kep/13/XII/1976, Kep 1693/MK/IV/12/1976 dan 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah Tingkat I, komando daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah, khususnya mengenai pajak - pajak kendaraan bermotor.

Pelaksanaan Operasional pada saat itu berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 16 Tahun 1977 tentang pedoman/petunjuk pelaksanaan SAMSAT dalam pengeluaran STNK, pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ. Landasan hukum pelaksanaan SAMSAT dari waktu kewaktu mengalami perubahan dan penyempurnaan hingga sampai pada ketentuan pelaksanaan terakhir di Jawa Barat, didasarkan pada keputusan bersama Gubernur Tingkat Daerah I Jawa Barat, kepala Kepolisian daerah Jawa Barat dan Kepala Cabang PT (*persero*) AK Jasa Raharja Jawa Barat Nomor 5

Tahun 1995, Nomor 13/605/III/1995 dan Nomor 004/JR-BDG-SAM/III/1995 Tanggal 21 Maret 1995.

Dinas Pendapatan dan Perpajakan daerah merupakan suatu instansi yang bertugas menangani kegiatan dibidang perpajakan, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), pajak non PKB/BBNKB dan non pajak. Dimana pelaksanaan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang ada disetiap Kabupaten dan Kota.

SAMSAT Bandung Barat mempunyai Visi dan Misi dalam menjalankan tugasnya.

Visi SAMSAT yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pemilik Kendaraan Bermotor.
3. Meningkatkan pendapatan Daerah dan Negara.

Sedangkan Misi SAMSAT yaitu :

"Mewujudkan pelayanan prima sebagai bukti nyata pengabdian kepada masyarakat"

2.1.2 Logo Instansi Terkait

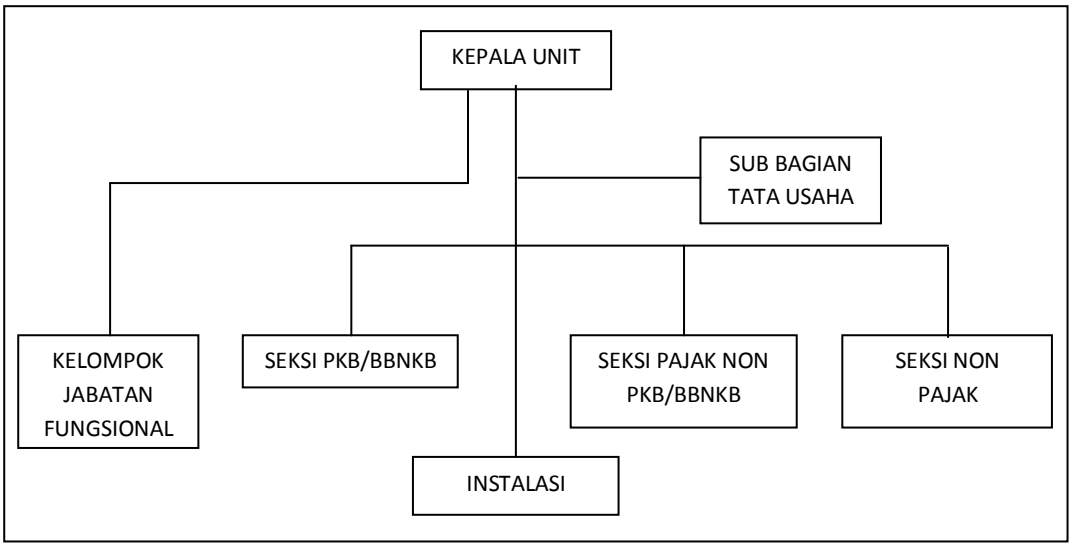


Gambar 2.1 Logo Instansi-Instansi Terkait Dalam Pengelolaan Kantor Bersama SAMSAT

2.1.3 Struktur Organisasi dan Job Description

Struktur Organisasi dapat dikatakan sebagai pola hubungan antara komponen-komponen atau bagian-bagian dari organisasi. Struktur Organisasi adalah Sistem yang paling mempengaruhi antara orang dengan kelompok kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sama. Struktur organisasi dikatakan juga suatu kerangka yang mewujudkan suatu pola tetap dari hubungan antara kedudukan dan peranan dalam lingkungan kerja.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kelancaran operasional pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi wilayah XX/SAMSAT Bandung Barat, maka berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2002 Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada gambar dibawah adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Sruktur Organisasi UPPD Wilayah XX/SAMSAT Bandung Barat

Dengan berpedoman kepada keputusan gubernur jawa barat nomor 5 tahun 2002 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pelaksanaan teknik dinas dilingkungan Dinas pendapatan propinsi jawa barat, maka rincian tugas karyawan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah propinsi wilayah XX (Bandung Barat) adalah sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelayanan Pendapatan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit pelaksanaan teknis dinas dilingkungan dinas pendapatan daerah propinsi jawa barat, sesuai dengan pembidangan tugas dan fungsinya.
7. Kepala UPP adalah unit pelaksanaan teknik dinas lingkungan dinas pendapatan propinsi jawa barat.
8. Peraturan daerah adalah peraturan daerah Propinsi Jawa Barat nomor 15 tahun 2002 tentang dinas daerah Propinsi Jawa Barat. Peraturan daerah Propinsi nomor 5 tahun 2000 tentang dinas daerah propinsi Jawa Barat.
9. Keputusan adalah keputusan Gubernur jawa barat tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pelaksanaan teknis dinas dilingkungan dinas pendapatan propinsi jawa barat.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraaan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.
12. Pendapatan Daerah adalah sebagian Kewenangan Dinas yang dikelola oleh UPP yang meliputi PKB/BBNKB dan non pajak.

BAGIAN PERTAMA

Umum

Pasal 2

(1) UPP dilingkungan Dinas terdiri dari:

a.	UPP Wilayah pelayanan I	(depok)
b.	UPP Wilayah pelayanan II	(Cibinong)
c.	UPP Wilayah pelayanan III	(Bogor)
d.	UPP Wilayah pelayanan IV	(sukabumi)
e.	UPP Wilayah pelayanan V	(cibadak)
f.	UPP Wilayah pelayanan VI	(pelabuhanratu)
g.	UPP Wilayah pelayanan VII	(cianjur)
h.	UPP Wilayah pelayanan VIII	(bekasi)
i.	UPP Wilayah pelayanan IX	(cikarang)
j.	UPP Wilayah pelayanan X	(karawang)
k.	UPP Wilayah pelayanan XI	(purwakarta)
l.	UPP Wilayah pelayanan XII	(subang)
m.	UPP Wilayah pelayanan XIII	(cirebon)
n.	UPP Wilayah pelayanan XIV	(sumber)
o.	UPP Wilayah pelayanan XV	(ciledug)
p.	UPP Wilayah pelayanan XVI	(indramayu)
q.	UPP Wilayah pelayanan XVII	(haurgeulis)
r.	UPP Wilayah pelayanan XVIII	(kuningan)
s.	UPP Wilayah pelayanan XIX	(majalengka)
t.	UPP Wilayah pelayanan XX	(bandung barat)
u.	UPP Wilayah pelayanan XXI	(bandung tengah)
v.	UPP Wilayah pelayanan XXII	(bandung timur)
w.	UPP Wilayah pelayanan XXIII	(padalarang)
x.	UPP Wilayah pelayanan XXIV	(rancaekek)
y.	UPP Wilayah pelayanan XXV	(sumedang)

z. UPP Wilayah pelayanan XXVI (garut)
aa. UPP Wilayah pelayanan XXVII (tasikmalaya)
bb. UPP Wilayah pelayanan XXVIII (sukaraja)
cc. UPP Wilayah pelayanan XXIX (ciamis)
dd. UPP Wilayah pelayanan XXX (pangandaran)
ee. UPP Wilayah pelayanan XXXI (cimahi)

(2) Unsur UPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini terdiri atas :
a. Kepala UPP
b. Sub bagian tata usaha
c. Seksi PKB/BBNKB
d. Seksi pajak non PKB/BBNKB
e. Seksi non pajak
f. Intalasi
g. Kelompok jabatan fungsional

(3) UPP mempunya tugas pokok melaksanakan fungsi dinas dibidang pelayanan pendapatan daerah.

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat 3 pasal ini mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan administrasi dibidang pendapata daerah.
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.

(5) Lokasi dan wilayah pelayanan masing-masing UPP terdiri atas beberapa kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisah dari keputusan ini.

BAGIAN DUA

Kepala UUP

Pasal 3

(1) Kepala UPP mempunya tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada ayat 1 pasal ini, kepala UPP mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan teknis operasional dibidang pendapatan daerah.
   b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.

(3) Rincian tugas kepala UPP :
   a. Memimpin, mengatur, mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan UPP.
   b. Menetapkan rencana kerja operasional tahunan sesuai dengan kebijakan teknis operasional dinas.
   c. Memberikan saran, pertimbangan atau informasi kepala dinas sebagai bahan kebijakan.
   d. Menyelenggarakan pengaturan pelayanan umum bidang PKB/BBNKB, pajak non PBK/BBNKB dan non pajak serta pendapatan lain yang menjadi kewenangan propinsi.
   e. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait.
   f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPP.

BAGIAN TIGA

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

(1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub bagian tata usaha mempunya fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja UPP.
   b. Pelaksanaan pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan , dan umum.

(3) Rincian tugas sub bagian tata usaha :

a. Melakukan kegiatan dalam ketatausahaan
b. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran.
c. Melaksanakan pengolahan dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan umum dilingkungan UPP.
d. Memberikan saran atau pertimbangan kepada kepala UPP mengenai hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
e. Mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan dibidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada kepala UPP untuk dijadikan pertimbangan lebih lanjut.
f. Melaksanakan pengurusan rumah tangga UPP.
g. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait.

BAGIAN KEMPAT

Seksi PKB/BBNKB

Pasal 5

(1) Seksi PKB/BBNKB mempunya tugas pokok melaksanakan pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, seksi PKB/BBNKB mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan dibidang pungutan PKB/BBNKB memalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Pelaksanaan kordinasi tugas pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB.
    c. Pengadilan tugas pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB.
(3) Rincian tugas seksi PKB/BBNKB :
    a. Melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendapatan, penelitian perhitungan dan penetapan, penagihan pembayaran dan penyetoran dibidang pungutan PKB/BBNKB.

b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya PKB/BNKB.
c. Menyusun rumusan guna penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan PKB/BBNKB dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar sebagaimana dimaksud huruf **b** diatas.
d. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait.
e. Melaksanakan evaluasi dan laporan.

BAGIAN KELIMA

Seksi Pajak Non PKB/BBNKB

Pasal 6

(1) Seksi Pajak Non PKB/BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pajak Non PKB/BBNKB.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pajak Non PKB/BBNKB mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan pelayanan dibidang Pajak Non PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Pengkordinasian pelaksanaan tugas pelayanan dibidang Pajak Non PKB/BBNKB.
    c. Pengendallian tugas pelayanan dibidang Pajak Non PKB/BBNKB.
    d. Pelaporan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Pajak Non PKB/BBNKB.
(3) Rincian tugas Seksi Pajak Non PKB/BBNKB :
    a. Melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian perhitungan dan penetapaan,penagihan, pembayaran dan penyetoran dibidang pungutan Pajak Non PKB/BBNKB.

b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya pajak dan tata cara pelunasan pembayaran Pajak Non PKB/BBNKB.
c. Menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan Pajak Non PKB/BBNKB dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib Pajak Non PKB/BBNKB.
d. Melaksanakan kordinasi dengan instalasi terkait.
e. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

BAGIAN KEENAM

Seksi Non Pajak

Pasal 7

(1) Seksi Non Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di bidang pungutan Non Pajak.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini, Seksi Non Pajak mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan administrasi pelayanan dibidang pungutan Retribusi di daerah melalui proses pungutan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Pelaksanaan monitoring dalam bidang penerimaan pendapatan lain-lain yang dikelola oleh Dinas/Instansi penghasilan dilingkungan Propinsi maupun hasil penerimaan dari Pemerintah Pusat.
    c. Pengendalian pelayanan dibidang pungutan Retribusi Daerah dan Non Pajak.
(3) Rincian tugas Seksi Non Pajak :
    a. Melaksanakan administrasi penagihan, pembayaran dan penyetoran dibidang pungutan tertentu dalam lingkungan pungutan Non Pajak.
    b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar mengenai besarnya pungutan dan tata

cara pelunasan pembayaran pungutan tertentu dalam lingkungan Non Pajak.

c. Menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan pungutan Non Pajak dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar sebagai mana dimaksud huruf **b** diatas.
d. Melaksanakan monitoring dalam bidang penerimaan pendapatan lain-lain yang dikelola oleh Dinas/Instansi penghasil dilingkungan Propinsi maupun hasil penerimaan dari Pemerintah Pusat.
e. Melaksanakan kordinasi dengan Instansi terkait.
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

BAGIAN KETUJUH

I n s t a l a s i

Pasal 8

(1) Instalasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai kegiatan operasional UPP dibidang pelayanan pendapatan daerah wilayah kerja atau wilayah pelayanan tertentu.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, instalasi mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Instalasi.
    b. Pelaksanaan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian perhitungan dan penetapan, pangalihan, pembayaran, dan penyetoran dibidang pungutan Pajak PKB/BBNKB, Pajak Non PKB/BBNKB dan Non Pajak.
    c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Instalasi.
(3) Jumlah, jenis dan lokasi Instalasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

BAGIAN KEDELAPAN

Kelompok Jabatan

Pasal 9

(1) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikordinasikan oleh seorang tenaga fungsional profesional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada dilingkungan UPP oleh kepala UPP.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Dasar Sistem

2.2.1.1 Pengertian Sistem

Definisi sistem menurut JOG [3] adalah:

"*Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu*".

Sedang definisi sistem menurut FAT [1] adalah :

"*Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sebuah komponen fungsional (dengan satuan fungsi / tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses / pekerjaan tertentu*"

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.1.2 Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang terdiri dari :

1. Komponen Sistem (*Components*)

   Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih besar yang disebut dengan *Supra System*.
2. Batas Sistem (*Boundary*)

   Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukan ruang lingkup (*Scope*) dari sistem tersebut.
3. Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)

   Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi suatu sistem. Lingkungan luar sitem dapat bersifat menguntungkan dan merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetao dijaga dan dipelihara.
4. Penghubung Sistem (*Interface*)

   Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsitem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya.

5. Masukan Sistem (*Input*)

   Masukan sistem adalah energi yang dimasukan kedalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*Maintanance Input*), yaitu energi yang simasukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi dan masukan sinyal (*Signal Input),* yaitu energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.

6. Keluaran Sistem (*Output*)

   Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.

7. Pengolah Sistem (*Proses*)

   Suatu sistem dapat mempunyai sesuatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran Sistem (*Objective*)

   Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*Goal*) dan sasaran (*Objective*). Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.

2.2.1.3 Klasifikasi Sistem

Sistem dapat dikelompokan atau diklasifikasikan menjadi beberapa sudut pandang, diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (*Abstract System*) dan sistem fisik (*Physical System*).

   Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik.

2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (*Natural System*) dan sistem buatan manusia (*Human Made System*).

   Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia.

3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (*Deterministic System*) dan sistem tak tentu (*Probabilistic System*).

   Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.
4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (*Closed System*) dan sistem terbuka (*Open System*).

   Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya.sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya.

2.2.2 Pengertian Informasi

Definisi informasi menurut JOG [3] adalah :

"*Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya*".

Sedangkan definisi informasi menurut SUT [10] adalah :

"*Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan*".

Dari uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa informasi yaitu data yang mempunyai nilai berarti bagi penerimanya dalam mengambil suatu keputusan.

2.2.3 Pengertian Sistem Informasi

Definisi sistem informasi menurut JOG [3] adalah :

"*Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan*".

Sedangkan definisi sistem informasi menurut SUT [10] adalah :

"*Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, pengolahan atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern serta menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat*".

Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa Sistem Informasi adalah kumpulan komponen baik perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi, prosedur, basis data dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang saling beriteraksi dalam upaya menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

2.2.4 Konsep Dasar Analisis Sistem

2.2.4.1 Pengertian Analisis

Analisis adalah proses pendefinisian kebutuhan untuk memperoleh sebuah pemecahan suatu masalah. Dengan kata lain analisis adalah pemeriksaan secara detail dengan jalan menguraikannya kedalam elemen-elemen yang membentuknya.

2.2.4.2 Pengertian Analisis Sistem

Analisis sistem adalah proses untuk melakukan identifikasi komponen sistem dan hubungan yang ada diantaranya yang digunakan untuk menentukan tujuan kebutuhan dana prioritas pengembangan sistem.

Fungsi Analisis Sistem :

a. Mengidentifikasikan masalah-masalah kebutuhan pemakai (*user*).
b. Menyatakan secara spesifik sasaran untuk memenuhi kebutuhan pemakai.
c. Merencanakan dan menerapkan rancanngan sistem pada aktifitas manajement.

2.2.4.3 Analisis Sistem Informasi

Merupakan tahapan proses untuk mengenai masalah, mengevaluasi dan sintesis, memahami spesifikasi serta melakukan tinjauan ulang pada suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian untuk mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dengan penyedia laporan-laporan yang diperlukan bagi pihak luar tertentu.

Alat-alat Analisis Sistem :

1. Diagram Sistem Prosedur (*Flowmap*)
   Diagram Sistem Prosedur merupakan alat bantu yang banyak digunakan untuk menentukan dokumen yang telibat. Bagian yang membuat dokumen dan menerima dokumen, menentukan proses yang dialami dokumen tersebut.
2. Diagram Konteks (*Contex Diagram*)
   Diagram Konteks menggambarkan arus informasi yang dikirim atau diterima ke atau dari suatu kegiatan lain.
3. Diagram Aliran Data (*Data Flow Diagram*)
   Gambar jaringan yang merepresentasikan sebuah sistem dimana sistem tersebut mungkin berupa sistem manual, otomatis atau gabungan antara manual dan otomatis.
4. Kamus Data (*Data Dictionary*)

Kamus Data adalah berupa catalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi, kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada di DFD bersifat global maka perlu penguraian tentang arus data tersebut yang lebih rinci dalam bentuk kamus data.

5. Normalisasi

   Normalisasi merupaka suatu pendekatan formal yang mengupdate dan elemen data secara bersama kedalam suatu bentuk yang dapat menampung perubahan dimasa yang akan datang.

2.2.5 Analisis dan Perancangan Terstruktur

Metode pendekatan sistem yang digunakan oleh penulis adalah analisis dan perancangan terstruktur. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

2.2.5.1 Diagram Konteks

Diagram konteks adalah diagram tingkat tinggi yang menggambarkan hubungan antar entitas eksternal dengan sistem. Dimana data yang diinputkan oleh bagian komponen eksternal yang akan akan diproses didalam sistem dan akan menghasilkan laporan yang diinginkan oleh komponen eksternal tersebut.

2.2.5.2 Data Flow Diagram (DFD)

Beberapa simbol yang digunakan di data flow diagram (DFD) diantaranya sebagai berikut :

1. Kesatuan luar (*Eksternal Entity*) atau batasan sistem (*Boundary*)

   Setiap sistem pasti mempunyai batas sistem (*Boundary*) yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya. Sistem akan menerima input dan menghasilkan output kepada

lingkungan luarnya. Kesatuan luar (*External Entity*) merupakan kesatuan (*Entity*) dilingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada dilingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem.

2. Arus data (*Data Flow*)

   Arus data di Data Flow Diagram (DFD) diberi simbol suatu panah. Arus data ini mengalir diantara proses (*Process*), simpanan data (*Data Store*) dan kesatuan luar. Arus data ini menunjukan arus data dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem.

3. Proses (*Process*)

   Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk kedalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses.

4. Simpanan data (*Data Store*)

   Merupakan simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau databases di sistem komputer, arsip atau catatan manual dan sebagainya.

2.2.5.3 Kamus Data

Kamus data atau disebut juga dengan istilah *system data dictionary* adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi.

Kamus data harus dapat mencerminkan keterangan yang jelas tentang data yang dicatatnya. Untuk maksud keperluan ini, maka kamus data harus memuat hal-hal berikut ini :

1. Nama Arus Data

   Karena kamus data dibuat berdasarkan arus data yang

mengalir di DAD, maka nama dari arus data juga harus dicatat dikamus data, sehingga mereka yang membaca DAD dan memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang suatu arus data tertentu di DAD dapat langsung mencarinya dengan mudah di kamus data.

2. Alias

   Alias atau nama lain dari kata data dapat dituliskan bila nama lain ini ada. Alias perlu ditulis karena data yang sama mempunyai nama yang berbeda untuk orang atau departemen satu dengan yang lainnya.

3. Bentuk Data

   - Dokumen dasar atau formulir
   - Dokumen hasil cetakan komputer
   - Laporan tercetak
   - Tampilan dilayar monitor
   - Variabel
   - Parameter
   - Field

4. Arus Data

   Arus data menunjukan dari mana data mengalir dan kemana data akan menuju.

5. Penjelasan

   Untuk lebih memperjelas lagi tentang makna dari arus data yang dicatat di kamus data, maka bagian pejelasan dapat diisi dengan keterangan-keterangan tentang arus data tesebut.

6. Periode

   Periode ini menunjukan kapan terjadinya arus data ini.

7. Volume

   Volume yang perlu dicatat di kamus data adalah tentang volume rata-rata dan volume puncak dari arus data.

8. Struktur Data

   Struktur data menunjukan arus data yang dicatat dikamus data terdiri dari item-item data apa saja.

2.2.5.4 Normalisasi

Normalisasi diartikan sebagai suatu teknik yang menstrukturkan data dalam cara-cara tertentu untuk mencegah timbulnya permasalahan pengolahan data dalam basis data. Permasalahan yang dimaksud adalah berkaitan dengan pernyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat adanya kerangkapan data dalam relasi dan efisiensi pengolahan.

Proses normalisasi akan menghasilkan relasi yang optimal, yaitu :

1. Memiliki struktur record yang konsisten secara logik.
2. Memiliki struktur record yang mudah untuk dimengerti.
3. Memiliki struktur record yang sederhana dalam pemeliharaan.
4. Memiliki struktur record yang mudah untuk ditampilkan kembali untuk memenuhi kebutuhan pemakai.
5. Minimalisasi kerangkapan data guna meningkatkan kinerja sistem.

Bentuk-bentuk normalisasi diataranya yaitu :

1. Relasi Bentuk Tidak Normal (*Un Normalized Form / UNF*)
   Relasi-relasi yang dirancang tanpa mengindahkan batasan dalam definisi basis data dan karakteristik RDBM akan menghasilkan relasi UNF. Bentuk ini harus dihindari dalam perancangan relasi dalam basis data. Relasi UNF mempunyai kriteria sebagai berikut :
   a. Jika relasi mempunyai bentuk non flat file (terjadi akibat data disimpan sesuai dengan kedatangannya sehingga tidak memiliki struktur yang sama).
   b. Jika relasi memuat set atribut berulang.
   c. Jika relasi memuat atribut non atomic value.
2. Relasi Bentuk Normal Pertama (*First Non Form/INF*)

Relasi disebut sebagai INF jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Jika seluruh atribut dalam relasi bernilai atomic.
b. Jika seluruh atribut dalam relasi bernilai tunggal.
c. Jika relasi tidak memuat set atribut berulang.
d. Jika semua record mempunyai sejumlah atribut yang sama.

Permasalahan dalam INF adalah sebagai berikut :

a. Tidak dapat menyisipkan informasi parsial.
b. Terhapusnya informasi ketika menghapus sebuah record.
c. Pembaharuan atribut non kunci mengakibatkan sejumlah record harus diperbaharui.

Untuk mengubah relasi UNF menjadi INF, dapat dilakukan dengan cara berikut :

a. Melengkapi nilai-nilai dalam atribut.
b. Mengubah struktur relasi.

3. Relasi Bentuk Normal Kedua (*Second Norm Form/2NF*)

Relasi disebut sebagai 2 NF jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Jika memenuhi kriteria 1NF.
b. Jika semua atribut non kunci FD pada PK.

Permasalahan dalam 2NF adalah sebagai berikut :

a. Kerangkapan data (*Data Redudancy*).
b. Pembaharuan yang tidak benar dapat menimbulkan inkonsistensi data (*Data Inconsistency*).
c. Proses pembaharuan data tidak efisien.
d. Penyimpangan/permasalahan pada saat penyisipan, penghapusan dan pembaharuan.

Untuk mengubah relasi 1NF menjadi 2NF dapat dilakukan dengan mengubah struktur relasi dengan cara :

a. Indentifikasi FD relasi 1NF.
b. Berdasarkan informasi tersebut, dekomposisi relasi 1NF menjadi relasi-relasi baru sesuai FD-nya. Jika menggunakan diagram, maka simpul-simpul yang berbeda pada puncak diagram ketergantungan data bertindak sebagai PK pada relasi baru.

4. Relasi Bentuk Normal Ketiga (*Third Norm Form/3NF*)

   Suatu relasi disebut sebagai 3NF jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

   a. Jika memenuhi kriteria 2NF.
   b. Jika setiap atribut non kunci tidak TDF (*Nontransitive Depedency*) terhadap PK.

   Permasalahan dalam 3NF adalah keberadaan penentu yang tidak merupakan bagian dari PK menghasilkan duplikasi rinci data pada atribut yng berfungsi sebagai FK (duplikasi berbeda dengan kelengkapan data).

   Untuk mengubah relasi 2NF menjadi bentuk 3NF dapat dilakukan dengan mengubah struktur relasi dengan cara :

   a. Identifikasi TDF relasi 2NF.
   b. Berdasarkan informasi tersebut, dekomposisi relasi 2NF menjadi relasi-relasi baru sesuai FD-nya. Jika menggunakan diagram, maka simpul-simpul yang berada pada puncak diagram ketergantungan data bertindak sebagai PK pada relasi baru.

5. Relasi Bentuk Normal Boyce-Codd (*Boyce-Codd Norm Form/BCNF*)

Bentuk normal BCNF dikemukakan oleh R.F Boyce dan E.F Codd.

Suatu relasi disebut BCNF jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Jika memenuhi kriteria 3NF.
b. Jika semua atribut penentu (determinan) merupakan CK.

6. Relasi Bentuk Normal Keempat (*Fourth Norm Form/4NF*)

   Relasi disebut sebagai 4NF jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

   a. Jika memenuhi kriteria BCNF.
   b. Jika setiap atribut didalamnya tidak mengalami ketergantungan pada banyak nilai.

7. Relasi Bentuk Normal Kelima (*Fifth Norm Form/5NF*)

   Suatu relasi disebut sebagai 5NF, jika kerelasian antar data dalam relasi tersebut tidak dapat direkonstruksi dari struktur relasi yang memuat atribut yang lebih sedikit.

2.2.5.5 ERD/Tabel Relasi

Entity Diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan model relasi antar rancangan data tersimpan (*File*) atau bentuk logika yang dipakai analisis dan desain suatu sistem informasi. Model relasi ini diperlukan untuk menggambarkan struktur data dan relasi antar data. Terdapat 2 komponen pembentuk model entity-relationship diantaranya :

1. Entitas (*Entity*) dan himpunan entitas (*Entity Sets*)

   Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata (eksistensinya) dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Seorang pegawai yang menjadi pegawai disebuah badan dan sebuah mobil yang melintas didepan kereta adalah entitas.

2. Atribut (*Atributes* / *Properties*)

   Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik (*Property*) dari entitas tersebut. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penentuan / pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting lainnya dalam pembentukan model data penetapan atribut bagi sebuah entitas umumnya memang didasarkan pada fakta yang ada.

Kardinalitas relasi menunjukan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Dari sejumlah kemungkinan banyaknya hubungan antara entitas tersebut, kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu kehimpunan entitas yang lain dan begitu juga sebaliknya. Kardinalitas relasi yang terjadi diantara himpunan entitas (misal A dan B) dapat berupa :

1. Satu ke Satu (One to One)
2. Satu ke Banyak (One to Many)
3. Banyak ke Satu (Many to One)
4. Banyak ke Banyak (Many to Many)

2.2.6 Basis Data (*Database*)

Basis Data adalah Kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu Ada juga yang mendefinisikan basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

Alasan Perlunya Basis Data

a. Basis data merupakan salah satu komponen penting dalam system informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi.
b. Basis data menentukan kualitas informasi : akurat, tepat pada waktunya dan relevan. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya.
c. Basis data mengurangi duplikasi data (*Data Redudancy*).
d. Dengan mengaplikasikan basis data hubungan data dapat ditingkatkan.
e. Basis data dapat mengurangi pemborosan tempat simpanan luar.

Bahasa Basis Data

Terdapat 2 macam bahasa Basis Data, diantaranya :

a. *Data Definition Language* (DDL), merujuk pada kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk mendefinisikan objek – objek basis data, seperti membuat sebuah tabel basis data atau indeks primer atau sekunder.
b. *Data Manipulation Language* (DML), mengacu pada kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan manipulasi data, seperti penyimpanan data ke suatu tabel, kemudian mengubahnya dan menghapusnya atau hanya sekedar menampilkannya kembali.

Objektif Basis Data

Secara lebih lengkap, pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan (*Objektif*) seperti berikut :

a. Kecepatan dan kemudahan (*Speed*)
b. Efisiensi ruang penyimpanan (*Space*)
c. Keakuratan (*Accuracy*)
d. Ketersediaan (*Avaibility*)
e. Kelengkapan (*Completeness*)
f. Keamanan (*Security*)
g. Kebersamaan pemakaian (*Sharability*)

2.2.7 Arsitektur Aplikasi

2.2.7.1 Pengertian Jaringan Komputer

Definisi jaringan komputer menurut SUT [11] adalah :

"*Jaringan komputer (Computer Network) merupakan interkoneksi sejumlah komputer dan peralatan lainnya yang dihubungkan dengan jalur transmisi dana alat komunikasi membentuk satu sistem sehingga dapat saling bertukar data, informasi atau menggunakan peralatan secara bersama (Sharing) untuk melaksanakan tugas pengolahan data*".

2.2.7.2 Jenis-jenis Jaringan Komputer

Berdasarkan luasnya jangkauan, jaringan komputer terdiri dari :

1. Work Group
   Yaitu jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dalam jumlah sedikit dalam sebuah ruangan.
2. *Local Area Network* (LAN)
   Yaitu suatu jaringan komunikasi data yag luas jangkauannya meliputi suatu area lokal tertentu.
   Keuntungan LAN :
   a. Memungkinkan pemakaian sumber daya secara bersama-sama.
   b. Meningkatkan produktifitas serta melindungi investasi yang ada.
   c. Memungkinkan pengiriman data yang lebih banyak dan kompleks serta pertukaran informasi yang lebih jelas.

   Kerugian LAN :

   a. Pembuatan instalasi jaringan tidak sederhana.
   b. Perlunya software khusus yang dirancang untuk *multi user*.

c. Perlunya pengaturan dan keamanan data didalam jaringan/*network*.
d. Virus dapat menyebar keseluruh jaringan.

3. Metropolitan Area Network (MAN)

   Yaitu suatu jaringan komunikasi data yang luas jangkauannya meliputi area dalam satu kota.

4. Wide Area Network (WAN)

   Yaitu suatu jaringan komunikasi data yang luas jangkauannya meliputi antar kota atau antar negara.

5. Gan (Global Area Network) / internet

   GAN merupakan suatu jaringan yang menghubungkan negara-negara diseluruh dunia. Kecepatan GAN bervariasi mulai dari 1,5 Mbps sampai dengan 100 Gbps dan cakupannya mencapai ribuan kilometer. Contoh dari jaringan GAN adalah internet.

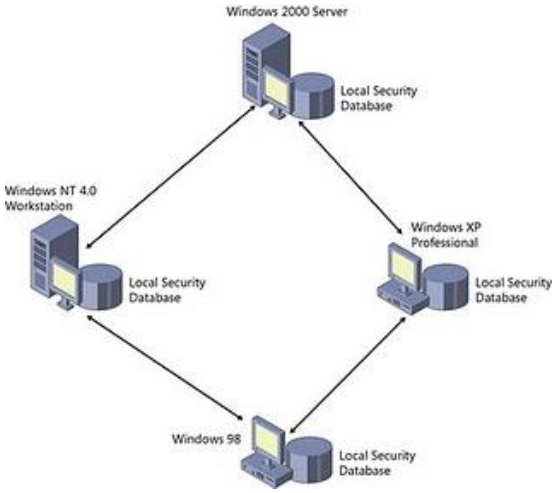
6. Jaringan tanpa kabel

   Jaringan tanpa kabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel.

Jenis-jenis jaringan berdasarkan kebutuhan diantaranya yaitu :

1. Peer to Peer

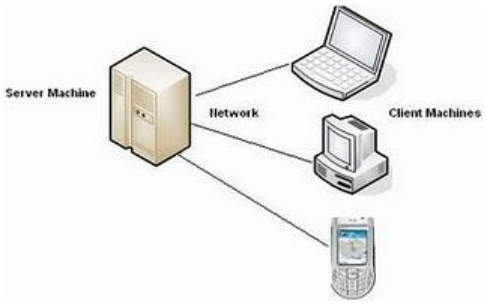
   Peet to peer atau sering disebut point to point merupakan jenis jaringan yang tidak melibatkan sumber daya terlalu tinggi. Pada setiap workstation tidak memiliki batasan yang khusus dalam hal pengaksesan data dan penggunaan sumber daya. Setiap komputer/workstation yang terhubung tidak dibatasi oleh sebuah hak akses. Semua workstation yang terhubung dapat menggunakan semua data dan dapat mengirimkan data tanpa ada batasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.3 Peer To Peer
(Sumber JOG [3])

2. Client-Server

   Komputer klien merupakan komputer yang selalu memerlukan sumber daya berupa data maupun sistem dari komputer server. Komputer server merupakan komputer yang mampu menyediakan dan menerima permintaan yang dilakukan oleh komputer klien. Didalam jenis ini, klien dan server akan sangat berhubungan erat. Apabila ada sebuah komputer yang selalu menyediakan sumber daya dan digunakan oleh komputer lain, komputer tadi disebut komputer server. Komputer yang hanya menerima dan mengkases ketersediaan data dari komputer lain akan disebut komputer klien.



Gambar 2.4 Client - Server
(Sumber JOG [3])

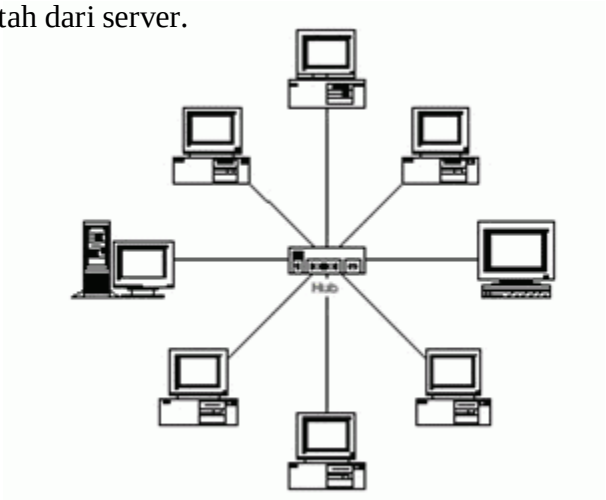
2.2.7.3 Topologi Jaringan Komputer

Topologi jaringan adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antar komponen-komponen jaringan, yang meliputi *server*, *workstation*, *hub*, dan pengkabelannya. Terdapat 3 macam Topologi jaringan umum digunakan, yaitu Bus, Star dan Ring.

Adapun metode yang saat ini digunakan adalah topologi star dimana topologi ini mempunyai ciri :

a. Control terpusat.
b. Semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut kesemua simpul / client yang dipilihnya.
c. Pemasangan / perubahan stasiun sangat mudah dan tidak menggangu bagian jaringan lain.
d. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan / kerusakan.
e. Dan kemudahan pengelolaan jaringan.

Simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau client server. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server maka setiap client-server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server.



Gambar 2.5 Topologi Star
(Sumber Nug [5])

2.2.7.4 Manfaat Jaringan Komputer

Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer, yaitu :

1. *Sharing resources*

   Sharing resources bertujuan agar seluruh program, peralatan atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai.
2. Media Komunikasi

   Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk teleconference maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya.
3. Integrasi Data

   Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat, karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Oleh sebab inilah maka dapat terbentuk data yang terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat.
4. Pengembangan dan Pemeliharaan

   Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya, karena setiap pembelian komponen seperti printer, maka tidak perlu membeli printer sejumlah komputer yang ada tetapi cukup satu buah karena printer itu dapat digunakan secara bersama – sama. Jaringan komputer juga memudahkan pemakai dalam merawat harddisk dan peralatan lainnya, misalnya untuk memberikan perlindungan terhadap serangan virus maka pemakai cukup memusatkan perhatian pada *harddisk* yang ada pada komputer pusat.

5. Keamanan Data

   Sistem Jaringan Komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data. Karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai, serta teknik perlindungan terhadap harddisk sehingga data mendapatkan perlindungan yang efektif.

6. Sumber Daya Lebih Efisien dan Informasi Terkini

   Dengan pemakaian sumber daya secara bersama – sama, akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kualitas yang tinggi. Selain itu data atau informasi yang diakses selalu terbaru, karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui oleh setiap pemakai.

2.2.8 Pengertian Client-Server

Definisi client server menurut NUG [7] adalah :

"*Komputer client merupakan komputer yang selalu memerlukan sumber daya berupa data maupun sistem dari komputer server. Komputer server merupakan komputer yang mampu menyediakan dan menerima permintaan yang dilakukan oleh komputer client*".

Didalam jenis ini, client dan server akan sangat berhubungan erat. Apabila ada sebuah komputer yang selalu menyediakan sumber daya dana digunakan oleh komputer lain, komputer tadi disebut komputer server. Komputer yang hanya menerima dan mengakses ketersediaan data dari komputer lain akan disebut komputer client.

2.2.9 Kasus Yang Dianalisis

2.2.9.1 Pengertian STNK

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah surat yang berfungsi sebagai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai nomor kendaraan bermotor.

Jadi yang dimaksud dengan pengelolaan STNK adalah prosedur pelayanan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang diawali dari proses masukan (*input*) sampai menjadi keluaran (*output*) yang berupa STNK.

2.2.9.2 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Definisi pajak menurut MEL [6] adalah :

"*Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional*".

Sedangkan definisi pajak menurut MAR [5] adalah :

"*Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum*".

Pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimana sistem dan mekanismenya menjadi ciri tersendiri dalam sistem perpajakan indonesia.

Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
   Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang.
   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Adapun ciri dan coraknya adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab mengenai penunaian kewajiban pajak berada pada anggota masyarakat wajin pajak itu sendiri.
3. Wajin pajak diberi kejpercayaan penuh untuk sapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung dan menyetor sendiri pajak yang tehutang (*self assesment*).

Fungsi pajak ada dua, yakni :

1. Fungsi Budgetair
   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi Mengatur
   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jadi yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.2.9.3 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) adalah surat yang berisikan ketetapan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dan biaya administrasi Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

SKPD ini berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) apabila sudah dibayar/divalidasi dan sebagainya. Persyaratan pengesahan dan pengambilan STNK, TNKB dan Peneng (Cap Register Pelunasan Pajak).

2.2.9.4 Pengertian Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)

Unit pelayanan pendapatan daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan pembidangan tugas dan fungsinya.

2.2.9.5 Pengertian SAMSAT

SAMSAT singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap, yang bertugas melayani masyarakat dalam memenuhi kewajiban dibidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).